

Syarief Hasan Minta Pemerintah Melarang WNA Masuk Indonesia

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan meminta pemerintah mengambil kebijakan pelarangan masuk bagi warga negara asing (WNA) ke Indonesia di masa penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Menurutnya, pelarangan masuknya WNA ke Indonesia di masa darurat adalah yang lumrah. Sebab, Indonesia tengah berada di kondisi darurat yaitu kasus harian melebihi 30 ribu per hari.

"WNA yang masuk ke Indonesia berpotensi menjadi medium penyebaran varian baru Covid-19, di tengah laju penyebaran Covid-19 yang tidak kunjung menunjukkan tren penurunan," kata Syarif dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (11/7).

Selain itu, kata Syarif, langkah tersebut perlu diambil dan relevan bagi pemerintah karena beberapa negara juga telah melakukan

pembatasan masuk warga negara Indonesia (WNI) ke negaranya.

Dia mencontohkan pada April 2021, Jepang melarang masuk warga dari 152 negara termasuk Indonesia. Lalu, Hong Kong melarang WNI masuk ke negaranya per 25 Juni 2021. Terbaru, Uni Emirat Arab dan Singapura melarang WNI masuk ke Indonesia selama masa darurat Covid-19.

"Ketika kita mencontoh negara lain yang berhasil keluar dari pandemi, mereka melakukan pembatasan ketat WNA dan pergerakan masyarakat, lokalisasi kasus, hingga vaksinasi cepat, sehingga Covid-19 tidak menyebar terus menerus," paparnya.

Dia juga menyebutkan negara lain sejak awal melakukan karantina wilayah atau "lockdown" hingga pembatasan ketat, sehingga kemudian berhasil menurunkan kasus Covid-19. ● mei

Polhukam

IDN/ANTARA



RUMAH SAKIT DARURAT PANGKALAN MARINIR JAKARTA

Seorang tenaga kesehatan menata tempat tidur di ruang isolasi di Rumah Sakit Darurat Pangkalan Marinir Jakarta, Sabtu (10/7). Rumah sakit darurat yang telah beroperasi sekitar tiga minggu tersebut mampu menampung sekitar 500 orang pasien dari militer maupun umum yang terpapar COVID-19 dengan gejala ringan yang merupakan rujukan dari RSAL Mintoardjo Jakarta akibat tingginya tingkat penularan COVID-19.

KSP Minta Masyarakat Tak Jadi Lalat Politik, Pengamat: Aduh Moeldoko Ini, Ampun...!

Moeldoko menggaungkan istilah lalat-lalat politik di tengah kondisi masyarakat serba sulit. Pernyataan Moeldoko ini menuai kritik pedas dari sejumlah kalangan.

JAKARTA (IM) - Pendiri lembaga survei Kedaikopi Hendri Satrio mengkritik keras Kepala Staf Presiden, Moeldoko, lantaran menggaungkan istilah 'lalat politik'. Hendri menilai pernyataan lalat politik seolah menstigmatisasi masyarakat tidak menghargai kinerja para tenaga kesehatan (nakes).

"Menurut saya, nggak pantas apa yang dilakukan Moeldoko, apa yang dikatakan Moeldoko. Hari ini pemerintah perlu masukan kritis dari masyarakat," kata Hendri kepada

wartawan, Minggu (11/7). Hendri mengingatkan kenaikan harga barang-barang terkait kesehatan, yang kini justru menjadi kebutuhan utama masyarakat. Pengamat politik yang kerap disapa Hensat itu menuding Moeldoko berunding di balik kerja keras para nakes.

"Semua harga-harga naik karena ada kaitannya dengan kesehatan. Obat sulit didapat, vitamin sulit didapat, kalau pun ada harganya melambung tinggi, dan kemudian yang

paling menyedapkan dari komentar Moeldoko itu, dia berunding dari kerja keras tenaga kesehatan, dokter, perawat dan lain-lain. Seolah-olah masyarakat tidak menghargai kerja keras mereka," papar Hensat.

Lebih lanjut, Hensat mengagaskan bahwa masyarakat saat ini menghargai kinerja para nakes. Buktinya, masyarakat rela membantu warga yang terpapar COVID-19, mengirim bantuan makanan hingga obat-obatan.

"Nah kalau kemudian rakyat patuh terhadap program pemerintah, saling bantu dan prihatin dengan melonjaknya harga-harga yang ada kaitannya dengan kesehatan, kemudian ada pembantu Jokowi yang bilang tentang lalat politik, di masa seperti ini dia ngomong gitu, itu sangat mengecewakan," imbuhnya.

Hensat juga mengingatkan

Moeldoko agar tidak berunding di balik jabatannya sebagai KSP untuk 'menyerang' kelompok politik tertentu. Dia mengagaskan bahwa masyarakat tidak akan peduli dengan kelompok politik yang Moeldoko serang.

Hensat menyebut pernyataan Moeldoko soal lalat politik bisa diperepsikan oleh masyarakat sebagai pernyataan resmi pemerintah. Dia mengingatkan kepada semua pejabat negara untuk berhati-hati dalam memberikan pernyataan.

"Bicara dengan menggunakan jaket pejabat, menggunakan kemeja pemerintah itu mudah diperepsikan sebagai komunikasi resmi pemerintah ke rakyatnya. Jadi setiap pejabat sebaiknya mempersiapkan pesan komunikasi dengan tepat," pungkas Hensat.

Politisi Partai Demokrat (PD) juga mengkritik keras Moeldoko karena menggaungkan istilah lalat-lalat politik di tengah kondisi masyarakat serba sulit.

"Lalat itu berkerumun di tumpukan sampah dan bangkai. Jadi, kalau benar ada lalat politik, Istana perlu introspeksi diri. Siapa yang menjadi sampah dan bangkai di lingkungan Istana, sehingga mengundang datangnya lalat politik?" kata Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP PD Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Minggu (11/7).

Lantas, siapa lalat-lalat politik yang dimaksud Moeldoko? Herzaky punya dugaan tersendiri. "Saat Presiden berusaha bekerja serius menangani pandemi dan menyelamatkan nyawa rakyat, siapa di Istana yang sibuk menyelamatkan ekonomi rekanan dan atau mencari cuan di tengah pande-

mi? Mungkin itu yang dimaksud Moeldoko," ucap Herzaky.

Khusus untuk Moeldoko, Herzaky menyarankan agar yang bersangkutan fokus menjalankan tugas dan fungsinya, membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menangani pandemi COVID-19 yang kini semakin mengganas.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebelumnya meminta masyarakat tidak penyesis dalam upaya keluar dari krisis Covid-19. Selain itu, dia meminta semua pihak tidak menjadi lalat politik.

Mulanya, Moeldoko meminta masyarakat agar tidak hanya mengkritik, tapi juga menghadirkan solusi.

"Pemerintah tidak anti-kritik, namun untuk saat ini marilah sertai kritikan dengan pesan komunikasi dengan tepat, bantu kami menyelamatkan masyarakat. Mari kita sama-sama bergerak untuk pemulihan bersama," imbaunya.

Moeldoko kemudian memperingat semua pihak agar tidak menjadi lalat-lalat politik. Menurutnya, lalat-lalat politik inilah yang mengganggu konsentrasi dalam penanganan pandemi.

"Saya mengingatkan semua pihak, janganlah menjadi lalat-lalat politik yang justru mengganggu konsentrasi," ungkap Moeldoko.

Dia menjelaskan bahwa lalat-lalat politik ini mengganggu konsentrasi mereka yang bekerja keras. Para tenaga kesehatan hingga ASN saat ini bekerja keras agar bisa keluar dari krisis ini.

"Konsentrasi siapa? Mereka-mereka yang saat ini bekerja keras. Bahkan mempertaruhkan hidup dan mati. Para tenaga medis dan para ASN saat ini bekerja keras untuk kita semua," tuturnya. ● han

Adam Deni Laporkan Jerinx ke Polda Metro Lantaran Dituduh Hilangkan Instragramnya

JAKARTA (IM) - Pegiat sosial Adam Deni melaporkan musisi I Gede Ari Astina alias Jerinx ke Polda Metro Jaya karena ia dituduh menghilangkan akun Instagram Jerinx.

"Betul (saya melaporkan). Intinya pemberitaan tuduhan menghilangkan akun Instagram dia," kata Adam saat dikonfirmasi, Minggu (11/7).

Laporan itu dibuat di Polda Metro Jaya, Sabtu (10/7), pukul 10.30 WIB. Sebelum melaporkan Jerinx, Adam mengaku sempat ingin melakukan mediasi dengan drummer Superman Is Dead itu.

"Dia nolak karena dia menganggap saya bukan siapa-siapa," ucap Adam.

Kuasa hukum Adam, Machi Ahmad mengatakan, kliennya

memilih menggunakan hak konstitusional sebagai warga negara dengan melaporkan Jerinx.

"Setelah sebelumnya adanya deadlock (tidak tercapai mufakat) terkait rencana perdamaian antara kedua belah pihak yang sebelumnya sudah dikomunikasikan via telepon," kata Machi dalam keterangannya.

"Dan saya sebagai kuasa hukum juga sudah mencoba mediasikan keduanya dengan semaksimal mungkin, namun sayangnya belum ada titik temu," lanjut Machi.

Terpisah, pihak Polda Metro Jaya akan memeriksa terkait laporan yang dibuat Adam dan kuasa hukumnya.

"Nanti di-cek ya," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus. ● han



IDN/ANTARA

PENGUNAAN PANSER ANOA DALAM PENYEKATAN JALAN DI KOTA BOGOR

Prajurit TNI AD bersama Dishub Kota Bogor menutup jalan saat penyekatan di Samping Mall BTM, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/7). Dalam penyekatan tersebut digunakan kendaraan tempur lapis baja Panzer Anoa milik TNI AD dalam upaya mendukung dan membantu pemerintah dalam kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa dan Bali.

Pulang ke Indonesia, SU Langsung Diciduk Polisi, Terancam Hukuman Mati

BINTAN (IM) - Seorang pekerja migran Indonesia (PMI) asal Lombok bernisial SU (43) ditangkap aparat kepolisian karena kedatangan membawa dua kilogram narkoba jenis sabu-sabu dan 49 butir pil ekstasi dari Malaysia, Sabtu (10/7).

Ia ditangkap polisi ketika menyelundupkan barang haram tersebut melalui pelabuhan tidak resmi di kawasan Tanjung Uban.

"Barang bukti sabu-sabu diikat di paha menggunakan lakban. Sedangkan pil ekstasi disimpan di dalam celana dalam," kata Kapolres Bintan Bambang Sugihartono.

Dia menyampaikan pelaku mendapat tugas membawa sabu-sabu dan pil ekstasi itu dari seorang PMI yang juga berasal dari Lombok bernisial JO, dan saat ini tengah berada di Malaysia. Pelaku dijanjikan menerima

upah sekitar Rp15 juta jika berhasil menyerahkan barang tersebut ke seseorang bernisial G di Lombok.

"Kami juga tengah melakukan penyelidikan terhadap J dan G," ujar Bambang.

Kapolres menyatakan SU kini sudah ditetapkan jadi tersangka dan ditahan di Mapolres Bintan guna proses hukum lebih lanjut. Kepada pihak kepolisian, lanjutnya, SU menyatakan nekat membawa sabu dan pil ekstasi karena tergiur dengan upah yang sangat besar, ditambah lagi istri di Lombok dalam kondisi sakit sehingga memerlukan biaya pengobatan.

Perbuatan tersangka melanggar UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling singkat enam tahun dan paling lama 20 tahun. ● han

Menag Larang Ada Antrean dalam Proses Pembagian Daging Kurban

JAKARTA (IM) - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas melarang adanya antrean dalam proses pembagian daging hewan kurban Idul Adha 1442 Hijriah/2021 Masehi. Ia pun meminta pembagian daging hewan kurban dilakukan dengan cara diantarkan langsung ke penerima yang berhak.

"Artinya secara khusus saya perlu sampaikan, dilarang ada antrean dalam pembagian daging kurban ini supaya di mention oleh para panitia penyembelihan hewan kurban," kata Yaqut dalam konferensi pers sidang isbat penetapan 1 Zulhijah, Sabtu (10/7).

Yaqut berharap penyembelihan hewan kurban sebisa mungkin dilakukan di rumah potong hewan. Namun, apabila rumah potong hewan mengalami keterbatasan penyembelihan hewan kurban bisa dilakukan di tempat lain.

Aturan penyembelihan hewan di tempat lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Surat Edaran (SE) Menag Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penindakan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Shalat Idul Adha dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kurban Tahun 1442 Hijriah/2021 Masehi di wilayah PPKM

Darurat.

Dalam SE disebutkan bahwa penyembelihan harus dilakukan di area yang luas dan memungkinkan untuk jaga jarak atau social distancing. Kemudian penyembelihan hanya boleh dihadiri oleh petugas penyembelihan atau panitia kurban dan disaksikan oleh pihak yang berkurban. Sedangkan proses penyembelihan hewan kurban diharapkan dapat dilaksanakan dalam waktu tiga hari. "Kami berharap penyembelihan hewan kurban ini bisa dilangsungkan dalam 3 hari yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijah," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah/2021 Masehi jatuh pada Selasa, 20 Juli 2021. Sedangkan, awal Zulhijah jatuh pada Minggu, 11 Juli 2021, setelah hilal atau bulan baru terlihat pada hari ini, Sabtu petang. Adapun hal itu diputuskan dalam sidang isbat penentuan awal Zulhijah yang dipimpin oleh Menag Yaqut Cholil, Sabtu (10/7).

"Hilal terlihat atau teramat secara mufakat sehingga 1 Zulhijah 1442 Hijriah ditetapkan jatuh pada Ahad 11 Juli 2021. Dengan begitu hari raya Idul Adha jatuh pada Selasa, 20 Juli 2021," ujar Yaqut. ● han



IDN/ANTARA

DAPUR UMUM KEMENSOS

Sejumlah petugas melakukan proses pengemasan makanan di dapur umum Kementerian Sosial di halaman gedung konvensi, Taman Makan Pahlawan Nasional Utama (TMPNU), Kalibata, Jakarta, Sabtu (10/7). Sebanyak 15.000-20.000 makanan disiapkan untuk tenaga kesehatan, petugas penyekatan PPKM dan petugas Taman Pemakaman Umum (TPU) di wilayah Jakarta.

23,9% Orang Tua Tak Setuju Belajar Tatap Muka Dimulai

JAKARTA (IM) - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengungkap 43,9% orang tua setuju dengan pembelajaran tatap muka (PTM) pada Juli, meski sedang terjadi lonjakan virus Corona.

P2G menyebut tingginya animo para orang tua ini karena merasa anaknya sudah jenuh belajar di rumah.

Demikian hasil survei yang dilakukan selama 3 hari dari 5-8 Juli dengan teknik sample random sampling. Ada 8.287 orang tua siswa di 34 provinsi. Orang tua diwawancarai menggunakan teknik kuesioner Google Form yang disebar di aplikasi perpesanan.

"Mengenai persetujuan orang tua terhadap dimulainya PTM, tahun ajaran baru Juli 2021, yang setuju dimulainya PTM bulan Juli itu 43,9% hampir setengahnya. 33,2% ragu-ragu, lalu 23,9% tidak setuju," kata Kabid Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri dalam konferensi virtual, Minggu (11/7).

Iman melihat persentase survei itu menunjukkan mayoritas orang tua setuju dimulainya PTM pada Juli. Padahal, kata Iman, angka ini sangat kontras saat kasus COVID-19 yang menjangkiti anak-anak justru melonjak tajam pada

akhir-akhir ini. "Catatan dari kami memang mayoritas orang tua secara tidak langsung setuju terhadap mulainya PTM pada bulai Juli 2021, padahal kita tahu sendiri COVID-19 semakin meningkat tadi sudah disebutkan bahwa banyak pasien COVID anak-anak yang terinfeksi COVID ini di Indonesia termasuk yang paling banyak," ungkapnya.

Iman menjelaskan, para orang tua yang setuju ini dilatarbelakangi karena sang anak telah jenuh dan bosan berada di rumah. Kemudian, para orang tua juga mengeluh karena anaknya lebih sering main game di rumah dibanding belajar.

"Yang setuju ini kan berjumlah 43,9%, apa alasan mereka 41% hampir setengahnya

karena anak bosan, 24,7% itu karena anaknya main game terus di rumah, 21,2% karena sinyal internet yang susah di daerahnya di lokasi tersebut, lalu 9,3% itu karena orang tua tidak memiliki kompetensi pengajaran di rumah gitu karena tidak semuanya ada yang menjawab seperti itu, dan yang lainnya menjawab lain," tuturnya.

P2G juga mengumpulkan persentase orang tua yang ragu-ragu dan tidak setuju untuk pembelajaran tatap muka dengan total 56,1 persen. Iman menerangkan orang tua yang tidak setuju pembelajaran tatap muka ini tidak lain karena memang mereka menyadari angka virus Corona ini sedang melonjak tajam di Tanah Air. ● han

PENGUMUMAN

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. HOTEL MERDEKA ABADI, Nomor 12, Tanggal 7 Juli 2021, yang dibuat oleh SONYA MALLA, S.H. Notaris di Surabaya, Jl. Darmokali 14 Surabaya, telah memutuskan:

1. Membubarkan PT. HOTEL MERDEKA ABADI, berkedudukan di Surabaya;
2. Menunjuk Direktur sebagai Likuidator; Berkenaan dengan hal tersebut, untuk dan atas nama PT. HOTEL MERDEKA ABADI, berkedudukan di Surabaya, saya, selaku Likuidator memberitahukan kepada kreditor yang berkepentingan dengan perseroan, untuk melakukan segala penyelesaian dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengumuman ini dan dapat disampaikan secara langsung maupun tertulis kepada Likuidator di Jl. Bongkaran 6, Surabaya.

Ttd
Direktur - Likuidator

PENGUMUMAN PEMBUBARAN

Berdasarkan akta Risalah Rapat PT. KOMPUMARTINDO NUSANTARA, tanggal 09 Juli 2021 nomor 04, yang dibuat oleh ADRIANTO ANWAR, SH, Notaris di Jakarta Barat, telah diputuskan untuk melikwidasi PT. KOMPUMARTINDO NUSANTARA, berkedudukan di Jakarta Pusat, dan menunjuk Direksi perseroan sebagai Likuidatur, kepada para pihak yang berkeberatan atas likwidasi tersebut diatas, dapat mengirimkan surat keberatan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini kepada:

DIREKSI
PT. KOMPUMARTINDO NUSANTARA
HARCO ELEKTRONIK MANGGA DUA
LT.2 BLOK B NO. 48-49,
MANGGA DUA SELATAN, SAWAH BESAR,
JAKARTA PUSAT 10730

PENGUMUMAN

Direksi PT. INDO INDAH, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") dengan ini mengumumkan rencana pengambilalihan saham-saham Perseroan oleh PT SITIAGUNG MAKHMUR dan PT UNGASAN SEMESTA RESORT, yang menyebabkan perubahan pengendalian pemegang saham dalam Perseroan.

Kepada pihak-pihak yang berkeberatan dengan pengambilalihan saham-saham Perseroan tersebut, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada:

KANTOR NOTARIS

JIMMY TANAL, SH, MKN

d/a. Gedung THE 'H' Tower

Lantai 20 Suite A & G

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-20 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini, dengan lewatnya waktu tersebut tidak ada keberatan yang akan dilayani.

Jakarta, 12 Juli 2021
Direksi PT. INDO INDAH
Direksi PT SITI AGUNG MAKHMUR
Direksi PT UNGASAN SEMESTA RESORT